

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025

2.1.1. Visi Jangka Panjang

Visi pembangunan Kabupaten Bintan yang akan dicapai dalam dua puluh tahun mendatang (RPJP 2005-2020) adalah :

“BINTAN GEMILANG 2025” GERAKAN MELANGKAH MAJU DI BIDANG KELAUTAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Penjabaran pernyataan Visi di atas adalah sebagai berikut :

- a) Gemilang 2025: Memiliki arti “Gerakan Melangkah Maju”, gerakan yang dimaksud merupakan gerakan pembangunan yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk lebih maju yang melibatkan secara aktif seluruh pihak di Kabupaten Bintan dengan jangka waktu target capaian sampai tahun 2025.
- b) Kelautan : Segala hal yang berkaitan dengan wilayah laut dan pantai, dengan mengoptimalkan seluruh kegiatan yang terkait dengan industri maritim, dimulai dari perikanan, marine industries, pelabuhan dan transportasi laut, mengingat kelautan sebagai core daerah, dengan luasan kabupaten Bintan 98,5% terdiri dari wilayah laut;
- c) Pariwisata : Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan wisata atau perjalanan untuk rekreasi, dalam skala industri dan kerakyatan dengan berfokus pad ekowisata;

- d) Kebudayaan : Merupakan kegiatan melestarikan dan memajukan seluruh hasil kegiatan dan penciptaan akal budi masyarakat seperti kesenian, dan adat istiadat dengan bersandar pada Budaya Melayu.

Tujuan akhir dari penancangan visi daerah tersebut adalah mewujudkan masyarakat Bintan Yang Sejahtera. Sejahtera dalam hal ini memiliki dimensi lahir maupun batin, dimana Sejahtera Lahir diartikan terpenuhi segala kebutuhan lahiriah dan kehidupan ekonomi masyarakat, terpenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan Sejahtera Batin diartikan terpenuhi kebutuhan rohaniah masyarakat dengan berlandaskan kehidupan beragama dan budaya. Dari sisi pembangunan untuk mencapai masyarakat sejahtera, perlu pengembangan kegiatan ekonomi sesuai potensi dan keunggulan kabupaten Bintan, yaitu sektor kelautan dan pariwisata sebagai core dan sekaligus sebagai driver activity. Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan mampu membawa dampak kemajuan daerah yang berkelanjutan, mampu tumbuh dan berkembang serta mengarah pada sistem ekonomi yang modern tetapi tetap peduli terhadap keberlanjutan sumber daya unggulan daerah dan pelestarian lingkungan.

2.1.2. Misi Jangka Panjang

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- a) Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal;
- b) Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;
- c) Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
- d) Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah pada setiap tahun anggaran seyogyanya berdasarkan hasil evaluasi pembangunan pada tahun anggaran sebelumnya. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi permasalahan yang selanjutnya dijadikan bahan untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan, selanjutnya disusun suatu arah pembangunan yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan melalui intervensi pembangunan yang dituangkan ke dalam kebijakan pembangunan yang bersifat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bintan pada tahun 2013 berpedoman Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015, yang merupakan pedoman operasional pembangunan, untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian, serta evaluasi bagi pelaksanaan pembangunan dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

2.2.1. Visi RPJMD Tahun 2010-2015

Visi Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 adalah :

” Menuju Bintan Yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya ”

makna dari visi dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Bintan Yang Maju: Bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik didukung oleh sumberdaya manusia yang unggul. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang Mandiri berbasis pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan beserta segenap potensinya secara berkelanjutan, namun

tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas.

- 2) Sejahtera : Menunjukkan kondisi kemakmuran masyarakat Bintan yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) dan spiritualnya.
- 3) Berbudaya : Perwujudan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai budaya yang harus dijaga kelestariannya sebagai pedoman pengembangan masyarakat. Perwujudan masyarakat yang memiliki sifat dan sikap yang terpuji dalam kehidupan sosial ekonomi, memiliki moral yang tinggi serta menjunjung norma-norma agama dan norma-norma adat yang berlaku.

2.2.2. Misi RPJMD Tahun 2010-2015

Usaha-usaha perwujudan visi Kabupaten Bintan 2015 dijabarkan dalam misi pembangunan Bintan tahun 2011– 2015 sebagai berikut :

- 1) Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing, berbudaya serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mewujudkan pembangunan perekonomian daerah yang berbasis pada pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- 3) Melanjutkan pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis.
- 4) Melanjutkan upaya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM.
- 5) Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang perkembangan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan.
- 6) Melanjutkan upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan pengarusutamaan gender.
- 7) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Sustainable Development).

2.2.3. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inheren dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

MISI 1. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing, berbudaya serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

| No. | Tujuan | Sasaran | Strategi |
|---|---|---|---|
| 1. | Peningkatan kualitas kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat Bintan. | Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama | Meningkatkan kualitas, pemahaman, pengamalan agama dan kerukunan umat bergama. |
| | | | Menciptakan kerukunan umat beragama secara fisik dan non fisik. |
| 2. | Perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat Bintan | Terpenuhinya standar aturan ketenaga kerjaan | Meningkatkan perlindungan dan pengawasan sistem ketenagakerjaan |
| | | | Menurunkan angka perselisihan pengusaha dan pekerja |
| | | Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 5,00% | Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja di sektor unggulan yang akan dikembangkan dan peluang kerja di sektor perikanan, pariwisata dan industri. |
| | | | Meningkatkan peluang kerja bagi penduduk lokal di Kab. Bintan. |
| | | | Melanjutkan upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja |
| Meningkatkan lapangan pekerjaan serta memberikan insentif untuk membuka lapangan pekerjaan. | | | |
| 3. | Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat | Terpenuhinya standar/ketentuan nasional pendidikan | Meningkatkan Angka Partisipasi P A U D dan Mempertahankan Rasio Guru-Muridnya |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | Bintan. | anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah | Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Dasar Mempertahankan Pemenuhan Kebutuhan Penduduk akan Sekolah dan Guru Pendidikan Dasar |
| | | | Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Menengah Meningkatkan mutu pendidikan menengah yang berbasis kompetensi Menyediakan Fasilitas Pendidikan Informal Meningkatkan Peran Pemuda dan Olahraga Membina dan mengembangkan olah raga Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan |
| | | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah | Meningkatkan sarana kesenian serta pembinaan dan perlindungan seni budaya daerah |
| | | Terlindunginya peninggalan sejarah dan warisan budaya melalui Peraturan Daerah | Penetapan Peraturan Daerah tentang perlindungan Benda, situs dan kawasan cagar budaya |
| 4. | Peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat Bintan | Terpenuhinya pelayanan kesehatan sesuai standar | Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat, gizi serta kesehatan keluarga Meningkatkan kesehatan keluarga Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan Meningkatkan kuantitas tenaga ahli kesehatan |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | Memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat miskin |
| | | | Mempromosikan pentingnya kesehatan kepada masyarakat |
| | | | Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan |
| | | | Mengawasi dan membina peredaran obat |
| | | | Meningkatkan Manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdaya guna dan berhasil guna |

MISI 2. Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang berbaasis pada pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan

| No. | Tujuan | Sasaran | Strategi |
|-----|--|--|---|
| 1. | Pembentukan iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bintan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan manusia serta pola tata ruang daerah dan mendorong perkembangannya agar lebih efisien dan mampu bersaing. (customer) | Meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata- rata UMKM sebesar 3,77% pertahun | Memberdayakan koperasi dan UMKM serta Mengembangkan kewirausahaan UKM |
| | | Meningkatnya unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebesar 150% | Meningkatkan kualitas dan kuantitas IKM dan mutu produk IKM |
| | | | Meningkatkan kerjasama investasi di Kabupaten Bintan |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 2. | Pengembangan kawasan minapolitan dengan memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal, adil dan berkelanjutan melalui pengembangan sarana dan prasarana penunjang minapolitan (core) | Terbentuknya kawasan minapolitan di 3 lokasi yang terletak di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Timur | Mengembangkan kawasan minapolitan dan meningkatkan produktifitas sektor kelautan perikanan. |
| 3. | Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah sektor kelautan dan perikanan. | Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8 % | Meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan potensi daerah |
| 4. | Peningkatan kapasitas pelayanan dan pengelolaan perkantoran | Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur sesuai standar | Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana, sumber daya manusia, dan kinerja aparatur |

MISI 3. Melanjutkan pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis

| No. | Tujuan | Sasaran | Strategi |
|-----|--|---|--|
| 1. | Pengembangan kawasan pariwisata melalui pengembangan sarana dan prasarana, promosi, pelayanan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup (core) | Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 19,76% menjadi 21,61% | Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Meningkatkan daerah tujuan wisata |
| 2. | Pemanfaatan potensi alam yang ada disertai dengan | Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 5.78% | Meningkatkan produksi tanaman perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | pemberdayaan pengelolaannya guna pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (core) | menjadi 8,00% dan Nilai Tukar Petani dari 100,72 % menjadi 105 % | Meningkatkan produktifitas dan kualitas komoditas sektor peternakan Meningkatkan produktifitas dan kualitas komoditas sektor peternakan |
| | | | Menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana pertanian |
| 3. | Meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan petani dan nelayan | Meningkatnya Rata-rata pendapatan petani dari Rp1,35 juta menjadi Rp2,17 juta | Meningkatkan kapasitas kelembagaan, keterampilan dan pengembangan teknologi bagi petani dan nelayan |

MISI 4. Melanjutkan upaya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi |
|----|---|--|--|
| 1. | Peningkatan kualitas aparatur pengawasan, pembinaan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah dalam usaha pemanfaatan, pengelolaan potensi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (control) | Meningkatnya kualitas pelayanan teknis administratif bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan regulasi yang berlaku | Meningkatkan kapasitas, ketatalaksanaan dan kelembagaan daerah Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat |
| | | Meningkatnya Kompetensi sumberdaya aparatur dari 40% menjadi 80% | Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur |
| | | Meningkatnya efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah dari 76,66% menjadi 86,66% | Meningkatkan efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah |
| | | Meningkatnya kinerja aparatur dari 40% menjadi 80% | Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja pemerintah daerah yang ditandai dengan opini LAKIP Daerah dari C menjadi A | Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan dan pembinaan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur |
| | | Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85% | Meningkatkan jumlah jaringan sistem kependudukan di seluruh kecamatan Menyusun data dan informasi kependudukan yang akurat serta meningkatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil |
| | | Meningkatnya kinerja pemerintah dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku | Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan Mempertahankan keberhasilan aparatur pemerintah dalam melayani warga Menata peraturan perundang-undangan Menata pemanfaatan dan pemilikan lahan |
| | | | Meningkatkan kualitas sistem administrasi perekonomian dan pembangunan Membina BUMD untuk menjadi penggerak ekonomi daerah Meningkatkan sistem administrasi pembangunan daerah Meningkatkan kualitas sistem administrasi umum |
| 2. | Pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan | Meningkatnya pembinaan masyarakat di kecamatan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan dari 90% menjadi 100% | Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan kemasyarakatan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang |
| 3. | Peningkatan fungsi dan peranan | Meningkatnya produk legislasi daerah yang | Meningkatkan kualitas anggota legislatif dan kapasitas lembaga |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | lembaga perwakilan rakyat daerah | disahkan dari 63,64% menjadi 100% | DPRD |
| 4. | Perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, Sumberdaya yang ada dan kebutuhan penduduk serta memperhatikan mitigasi bencana. (core) | Meningkatnya kesesuaian muatan perencanaan daerah dengan implementasinya dari 70% menjadi 90% | <p>Meningkatkan kualitas data perencanaan daerah</p> <p>Meningkatkan kapasitas perencanaan spasial</p> <p>Meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan SDA</p> <p>Meningkatkan kapasitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</p> <p>Meningkatkan kualitas lembaga dan tenaga perencana daerah</p> <p>Meningkatkan kemampuan perencanaan daerah bawahan</p> <p>Mempertahankan keberhasilan perencanaan pembangunan daerah</p> <p>Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah</p> <p>Meningkatkan pembangunan manusia</p> |
| 5. | Peningkatan kesiapan daerah dalam menghadapi bencana | Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana | <p>Menyediakan rencana aksi penanggulangan bencana daerah serta peningkatan kepedulian masyarakat dalam menghadapi bencana</p> <p>Menangani kejadian bencana sosial</p> |
| 6. | Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah | Membaiknya opini laporan keuangan daerah dari WDP menjadi WTP | Meningkatkan mutu laporan keuangan dan ketaatan terhadap standar pengelolaan keuangan daerah |
| 7. | Peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah | Meningkatnya penerimaan daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar | Meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak |
| 8. | Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa serta nilai-nilai demokrasi | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dari 49,4% menjadi 60% | Mengembangkan wawasan kebangsaan dan kesadaran politik masyarakat |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 9. | Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Bintan | Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105 | Mengendalikan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah |
| | | | Mengembangkan kapasitas penegak hukum |
| | | | Membina masyarakat untuk ketahanan dan perlindungan |
| 10. | Peningkatan kualitas arsip dan perpustakaan daerah | Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembangnya minat baca masyarakat | Meningkatkan dan Mengembangkan Kapasitas Lembaga Kearsipan dan Perpustakaan Daerah |
| | | | Mengembangkan perpustakaan daerah |
| 11. | Peningkatan kesehatan, kesejahteraan dan ketahanan keluarga | Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49% | Meningkatkan jumlah keluarga sejahtera |
| | | | Meningkatkan ketahanan keluarga |

MISI 5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang perkembangan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan.

| No. | Tujuan | Sasaran | Strategi |
|-----|--|--|--|
| 1. | Peningkatan keandalan sistem/jaringan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman Kabupaten Bintan | Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan drainase | Membangun dan Merehabilitasi Jalan, Jembatan, Drainase dan Gorong-Gorong |
| | | | Memelihara jalan dan jembatan |
| | | | Meningkatkan sistem drainase |
| | | | Mengembangkan sarana & prasarana perumahan & permukiman |
| | | | Mengembangkan pelayanan air minum dan air limbah |
| | | | Mengendalikan dampak banjir |
| | | | Meningkatkan perencanaan teknis dan dokumen rencana bidang kepekerjaan umum |
| | | | Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum dan aparatur pemerintahan |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana ibukota |
| | | | Meningkatkan utilitas penerangan di kawasan ruang terbuka |
| 2. | Penyediaan energi listrik bagi masyarakat Kabupaten Bintan | Meningkatnya rumah tangga yang terlayani kebutuhan listrik dari 60,38% menjadi 65% | Menyediakan jaringan dan pembangkit listrik bagi masyarakat |
| | | Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah | Meningkatkan Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah |
| | | | Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan |
| | | | Meningkatkan kualitas kebijakan bidang perhubungan |
| | | | Meningkatkan pelayanan angkutan umum |
| | | | Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi kepada institusi jasa pos dan telekomunikasi |
| | | | Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bidang kebandar-udaraan |

MISI 6. Melanjutkan upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan pengarusutamaan gender

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi |
|---|---|--|---|
| 1. | Pengembangan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi sumberdaya alam dengan optimal. (culture) | Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8% | Menurunkan jumlah penduduk miskin dengan meningkatkan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial |
| Menurunnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21 | | Meningkatkan bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | |
| | | Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat | |
| | | | Meningkatkan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahteraan sosial |
| 2. | Pengembangan dan | Meningkatnya | Mengembangkan dan |

| | | | |
|----|--|---|---------------------------------------|
| | Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bintan | partisipasi masyarakat dalam pembangunan | memberdayakan masyarakat pedesaan |
| 3. | Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan Daerah | Meningkatnya Indeks kesetaraan gender dari 24,45 menjadi 30,1 | Meningkatkan Indeks kesetaraan gender |

MISI 7. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Sustainable Development)

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi |
|----|--|--|--|
| 1. | Penyusunan dan Penetapan struktur, pemanfaatan dan pengelolaan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan sebagai pedoman pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang multisektoral dan terpadu. (concequency) | Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan Kabupaten Bintan | Menyusun struktur, pemanfaatan, dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan |
| 2. | Peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bintan | Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79% | Memenuhi kualitas lingkungan hidup daerah yang sesuai standar Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan kualitas masyarakat dalam mengelola SDA dan Lingkungan Hidup Meningkatkan pengendalian Lingkungan Hidup |
| 3. | Pembentukan Kabupaten Bintan daerah yang bersih hijau, dan asri | Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 20,50% menjadi 100% | Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2 | Meningkatkan/ Mempertahankan luas ruang terbuka hijau dan pengelolaan tempat pemakaman umum |
| 4. | Peningkatan kelestarian sumber daya hutan di Kabupaten Bintan | Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha | Memantapkan dan meningkatkan upaya perlindungan hutan |
| | | | Meningkatkan fungsi DAS |
| | | | Meningkatkan inventarisasi dan dokumentasi sumber daya hutan |
| 5. | Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan | Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan dan pemanfaatan sumber daya air |
| | | | Peningkatan pembinaan dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi |

2.2.4. Arah Kebijakan Pembangunan

Strategi harus dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu.

MISI 1. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing, berbudaya serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

| No. | Sasaran Pokok/ Target Kinerja | Arah Kebijakan | | | | |
|-----|---|--|---------|---------|---------|---------|
| | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
| 1 | Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama | Meningkatkan Kualitas, Pemahaman, Pengamalan Agama dan Kerukunan Umat Beragama | | | | |
| | | Menciptakan kerukunan umat beragama secara fisik dan non fisik | | | | |

| No. | Sasaran Pokok/ Target Kinerja | Arah Kebijakan | | | | |
|-----|--|--|---|---------|---------|---------|
| | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
| 2 | Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 5,00% | Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja di sektor unggulan yang akan dikembangkan dan peluang kerja di sektor perikanan, pariwisata dan industri | | | | |
| | | Meningkatkan peluang kerja bagi penduduk lokal di Kabupaten Bintan | | | | |
| | | Melanjutkan upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja | | | | |
| | | Meningkatkan lapangan pekerjaan serta memberikan insentif untuk membuka lapangan pekerjaan. | | | | |
| 3 | Terpenuhinya standar/ketentuan nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah | Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Mempertahankan Rasio Guru-Muridnya | | | | |
| | | Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Dasar | | | | |
| | | Mempertahankan Pemenuhan Kebutuhan Penduduk akan Sekolah dan Guru Pendidikan Dasar | | | | |
| | | Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Menengah | | | | |
| | | Meningkatkan mutu pendidikan menengah yang berbasis kompetensi | | | | |
| | | Menyediakan Fasilitas Pendidikan Informal | | | | |
| | | Meningkatkan Peran Pemuda dan Olahraga | | | | |
| | | Membina dan mengembangkan olah raga | | | | |
| | | Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | | | | |
| 4 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah | Meningkatkan sarana kesenian serta pembinaan dan perlindungan seni budaya daerah | | | | |
| 5 | Terlindunginya peninggalan sejarah dan warisan budaya melalui Peraturan Daerah | - | Penetapan Peraturan Daerah tentang perlindungan Benda, situs dan kawasan cagar budaya | - | - | |
| 6 | Peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat Bintan | Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat, gizi serta kesehatan keluarga | | | | |
| | | Meningkatkan kesehatan keluarga | | | | |
| | | Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif | | | | |
| | | Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan | | | | |
| | | Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan | | | | |
| | | Meningkatkan kuantitas tenaga ahli kesehatan | | | | |
| | | Memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat miskin | | | | |
| | | Mempromosikan pentingnya kesehatan kepada masyarakat | | | | |

| No. | Sasaran Pokok/ Target Kinerja | Arah Kebijakan | | | | |
|-----|----------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
| | | Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan | | | | |
| | | Mengawasi dan membina peredaran obat | | | | |
| | | Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdaya guna dan berhasil guna | | | | |

MISI 2. Mewujudkan pembangunan perekonomian daerah yang berbasis pada pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan

| No. | Sasaran Pokok/ Target Kinerja | Arah Kebijakan | | | | |
|-----|--|--|---------|---------|---------|---------|
| | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
| 1 | Meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun | Memberdayakan koperasi dan UMKM serta Mengembangkan kewirausahaan UKM | | | | |
| 2 | Meningkatnya unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebesar 150% | Meningkatkan kualitas dan kuantitas IKM dan mutu produk IKM | | | | |
| | | Meningkatkan kerjasama investasi di Kabupaten Bintan | | | | |
| 3 | Terbentuknya kawasan minapolitan di 3 lokasi yang terletak di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Timur | Mengembangkan kawasan minapolitan dan meningkatkan produktifitas sektor kelautan perikanan | | | | |
| 4 | Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8% | Meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan potensi daerah | | | | |
| | | Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan | | | | |

MISI 3. Melanjutkan pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis

| No. | Sasaran Pokok/ Target Kinerja | Arah Kebijakan | | | | |
|-----|--|--|---------|---------|---------|---------|
| | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
| 1 | Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 19,76% menjadi 21,61% | Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan | | | | |
| | | Meningkatkan daerah tujuan wisata | | | | |
| 2 | Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 5,79% menjadi 7,21% dan Nilai Tukar Petani dari 100,72 % menjadi 105 % | Meningkatkan produksi tanaman perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan | | | | |
| | | Meningkatkan produktifitas dan kualitas komoditas sektor peternakan | | | | |
| | | Menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana pertanian | | | | |

| No. | Sasaran Pokok/ Target Kinerja | Arah Kebijakan | | | | |
|-----|---|---|---------|---------|---------|---------|
| | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
| 3 | Meningkatnya Rata-rata pendapatan petani dari Rp1,35 juta menjadi Rp2,17 juta | Meningkatkan kapasitas kelembagaan, keterampilan dan pengembangan teknologi bagi petani dan nelayan | | | | |

MISI 4. Melanjutkan upaya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM.

| No. | Sasaran Pokok/ Target Kinerja | Arah Kebijakan | | | | |
|--|--|--|---------|---------|---------|---------|
| | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan teknis administratif bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan regulasi yang berlaku | Meningkatkan kapasitas, ketatalaksanaan dan kelembagaan daerah | | | | |
| | | Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat | | | | |
| 2 | Meningkatnya Kompetensi sumberdaya aparatur dari 40% menjadi 80% | Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur | | | | |
| 3 | Meningkatnya efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah dari 76,66% menjadi 86,66% | Meningkatkan efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah | | | | |
| 4 | Meningkatnya kinerja aparatur dari 40% menjadi 80% | Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur | | | | |
| 5 | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja pemerintah daerah yang ditandai dengan opini LAKIP Daerah dari C menjadi A | Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan dan pembinaan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah | | | | |
| | | Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur | | | | |
| 6 | Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85% | Meningkatkan jumlah jaringan sistem kependudukan di seluruh kecamatan | | | | |
| | | Menyusun data dan informasi kependudukan yang akurat serta meningkatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil | | | | |
| 7 | Meningkatnya kinerja pemerintah dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku | Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan | | | | |
| | | Mempertahankan keberhasilan aparatur pemerintah dalam melayani warga | | | | |
| | | Menata peraturan perundang-undangan | | | | |
| | | Menata pemanfaatan dan pemilikan lahan | | | | |
| | | Meningkatkan kualitas sistem administrasi perekonomian dan pembangunan | | | | |
| | | Membina BUMD untuk menjadi penggerak ekonomi daerah | | | | |
| | | Meningkatkan sistem administrasi pembangunan daerah | | | | |
| Meningkatkan kualitas sistem administrasi umum | | | | | | |

| No. | Sasaran Pokok/ Target Kinerja | Arah Kebijakan | | | | |
|-----|--|---|---------|---------|---------|---------|
| | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
| 8 | Meningkatnya pembinaan masyarakat di kecamatan | Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan kemasyarakatan | | | | |
| | | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang | | | | |
| 9 | Meningkatnya produk legislasi daerah yang disahkan dari 63,64% menjadi 100% | Meningkatkan kualitas anggota legislatif dan kapasitas lembaga DPRD | | | | |
| 10 | Meningkatnya kesesuaian muatan perencanaan daerah dengan implementasinya dari 70% menjadi 90% | Meningkatkan kualitas data perencanaan daerah | | | | |
| | | Meningkatkan kapasitas perencanaan spasial | | | | |
| | | Meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan SDA | | | | |
| | | Meningkatkan kapasitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | | | | |
| | | Meningkatkan kualitas lembaga dan tenaga perencana daerah | | | | |
| | | Meningkatkan kemampuan perencanaan daerah bawahan | | | | |
| | | Mempertahankan keberhasilan perencanaan pembangunan daerah | | | | |
| | | Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah | | | | |
| 11 | Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana | Menyediakan rencana aksi penanggulangan bencana daerah serta peningkatan kepedulian masyarakat dalam menghadapi bencana | | | | |
| | | Menangani kejadian bencana sosial | | | | |
| 12 | Membatkannya opini laporan keuangan daerah dari WDP menjadi WTP | Meningkatkan mutu laporan keuangan dan ketaatan terhadap standar pengelolaan keuangan daerah | | | | |
| 13 | Meningkatnya penerimaan daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar | Meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak | | | | |
| 14 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dari 49,40% menjadi 60% | Mengembangkan wawasan kebangsaan dan kesadaran politik masyarakat | | | | |
| 15 | Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105 | Mengendalikan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah | | | | |
| | | Mengembangkan kapasitas penegak hukum | | | | |
| | | Membina masyarakat untuk ketahanan dan perlindungan | | | | |
| 16 | Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembangnya minat baca masyarakat | Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas lembaga kearsipan dan perpustakaan daerah | | | | |
| | | Mengembangkan perpustakaan daerah | | | | |
| 17 | Terpenuhinya standar aturan ketenagakerjaan | Meningkatkan perlindungan dan pengawasan sistem ketenagakerjaan | | | | |
| | | Menurunkan angka perselisihan pengusaha dan pekerja | | | | |
| 18 | Menurunnya jumlah | Meningkatkan jumlah keluarga sejahtera | | | | |

| No. | Sasaran Pokok/ Target Kinerja | Arah Kebijakan | | | | |
|-----|---|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
| | keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49% | Meningkatkan ketahanan keluarga | | | | |
| 19 | Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur sesuai standar | Disesuaikan masing-masing SKPD | | | | |

MISI 5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang perkembangan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan

| No. | Sasaran Pokok/ Target Kinerja | Arah Kebijakan | | | | |
|--|--|--|---------|---------|---------|---------|
| | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
| 1 | Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan drainase | Membangun dan merehabilitasi jalan, jembatan, drainase dan gorong-gorong | | | | |
| | | Memelihara jalan dan jembatan | | | | |
| | | Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman | | | | |
| | | Mengembangkan pelayanan air minum dan air limbah | | | | |
| | | Mengendalikan dampak banjir | | | | |
| | | Meningkatkan perencanaan teknis dan domes rencana bidang kepekerjaan umum | | | | |
| | | Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum dan aparatur pemerintahan | | | | |
| | | Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana ibukota | | | | |
| 2 | Meningkatnya rumah tangga yang terlayani kebutuhan listrik dari 60,38% menjadi 65% | Menyediakan jaringan dan pembangkit listrik bagi masyarakat | | | | |
| 3 | Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah | Meningkatkan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah | | | | |
| | | Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan | | | | |
| | | Meningkatkan kualitas kebijakan bidang perhubungan | | | | |
| | | Meningkatkan pelayanan angkutan umum | | | | |
| | | Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi kepada institusi jasa pos dan telekomunikasi | | | | |
| Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bidang kebandarudaraan | | | | | | |

MISI 6. Melanjutkan upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan pengarusutamaan gender

| No. | Sasaran Pokok/ Target Kinerja | Arah Kebijakan | | | | |
|-----|---|--|---------|---------|---------|---------|
| | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
| 1 | Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8% | Menurunkan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial | | | | |
| 2 | Menurunnya persentase penyandang masalah | Meningkatkan bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | | | | |

| No. | Sasaran Pokok/ Target Kinerja | Arah Kebijakan | | | | |
|-----|---|--|---------|---------|---------|---------|
| | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
| | kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21% | Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat | | | | |
| | | Meningkatkan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahteraan sosial | | | | |

MISI 7. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Sustainable Development)

| No. | Sasaran Pokok/ Target Kinerja | Arah Kebijakan | | | | |
|-----|---|--|---------|---------|---------|---------|
| | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
| 1 | Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan Kabupaten Bintan | Menyusun struktur, pemanfaatan, dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan | | | | |
| 2 | Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79% | Memenuhi kualitas lingkungan hidup daerah yang sesuai standar | | | | |
| | | Meningkatkan kualitas LH | | | | |
| | | Meningkatkan kualitas masyarakat dalam mengelola SDA dan L | | | | |
| | | Meningkatkan pengendalian LH | | | | |
| 3 | Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 20,50% menjadi 100% | Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan | | | | |
| 4 | Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2 | Meningkatkan/ Mempertahankan luas ruang terbuka hijau dan pengelolaan tempat pemakaman umum | | | | |
| 5 | Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha | Memantapkan dan meningkatkan upaya perlindungan hutan | | | | |
| | | Meningkatkan fungsi DAS | | | | |
| | | Meningkatkan inventarisasi dan dokumentasi sumber daya hutan | | | | |
| 6 | Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan dan pemanfaatan sumber daya air | | | | |
| | | Peningkatan pembinaan dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi | | | | |

2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2015

Prioritas pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2015 sebagaimana dicantumkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2015, pada dasarnya merupakan upaya penyelesaian secara bertahap atau sekaligus rencana pembangunan daerah dalam kerangka pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan itu sendiri yakni kesejahteraan masyarakat, prioritas pembangunan dimaksud sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing, berbudaya serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Pembangunan perekonomian daerah yang berbasis pada pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 3) Pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis;
- 4) Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM;
- 5) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang perkembangan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan;
- 6) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan pengarusutamaan gender;
- 7) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Sustainable Development).

Disamping prioritas tersebut diatas juga disejalankan prioritas nasional yaitu: penanggulangan kemiskinan; Peningkatan ketahanan pangan; perbaikan iklim investasi dan iklim usaha; peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; pembangunan daerah tertinggal, terluar, terdepan dan pasca konflik; serta Pengembangan kebudayaan, kualitas dan inovasi teknologi. Dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2015 memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan dan Mempertimbangkan pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan millennium (Millennium Development Goals/MDG's).
- 2) Menghadapi tantangan persaingan untuk meraih peluang memasuki bentuk integrasi ekonomi asean yang dikenal dengan Asean Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai pada tahun 2015.
- 3) Antisipasi prabencana, penanggulangan bencana dan pascabencana.
- 4) Mendukung optimalisasi penerapan kurikulum baru tahun 2013 sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, pembangunan, operasional pemeliharaan, rehabilitasi/renovasi sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan alat peraga, peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.

- 5) Pemenuhan sarana dan prasarana serta peningkatan mutu fasilitas yankes, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, penanggulangan masalah gizi masyarakat, penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) serta mendorong Jamkesda
- 6) Penyediaan dan layanan air bersih setiap rumah tangga, penataan MCK, lingkungan kumuh, sanitasi, persampahan, polusi dan pencermatan air, udara dan tanah dipedesaan dan perkotaan.
- 7) Penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur, jaringan irigasi, waduk dan situ, pengendalian banjir, penataan pelantar dan dermaga, jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan kantong kantong produksi serta membuka keterisolasian untuk kelancaran arus barang dan orang dalam upaya menekan ekonomi biaya tinggi, pembangunan dan penataan pasar tradisional.
- 8) Penataan ruang dan lingkungan hidup dalam upaya pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pencegahan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan RTRW, Optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan pengamanan kawasan lindung, sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- 9) Penyediaan dan pemanfaatan lahan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ketersediaan rumah layak huni, menetapkan kebijakan dan strategi dibidang perumahan dan kawasan permukiman.
- 10) Pengembangan kepemimpinan pemuda, peningkatan potensi keteladanan, keberpengaruhan serta menggerakkan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan.
- 11) Mendorong, melaksanakan dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal, optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang perizinan secara cepat, mudah dan murah.
- 12) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat berupa kemudahan akses permodalan, pembinaan manajemen usaha serta pemasaran, pemberdayaan koperasi, pemberdayaan UKM dalam menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil, fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan UKM.

- 13) Mendorong peningkatan kegiatan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha yang bersifat padat karya untuk mengurangi angka pengangguran dalam rangka pengentasan kemiskinan, pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja, pengawasan pelaksanaan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan kerja, serta penerbitan rekomendasi perijinan magang ke luar negeri, pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan pelatihan kerja.
- 14) Penyediaan dan pengendalian ketersediaan pupuk, bibit, obat-obatan pembasmi hama dan sarana produksi pertanian serta peningkatan intensitas tenaga penyuluh pertanian untuk mendukung ketahanan pangan, pencegahan alih fungsi lahan pertanian, pengembangan keanekaragaman produk pertanian, identifikasi kebutuhan ketersediaan pangan.
- 15) Mendorong peningkatan peranan perempuan berpartisipasi dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam upaya mencapai 30% keterwakilan perempuan, perlindungan terhadap perempuan yang responsive gender berupa pemberdayaan, pelayanan kesehatan, mental spiritual, pendidikan, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi dan jual beli anak dan remaja (trafficking) dan kekerasan seksual.
- 16) Dukungan operasional jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penyediaan sarana, alat, obat dan cara penggunaan kontrasepsi, penyuluhan keluarga sejahtera, pemberian dukungan kesehatan reproduksi remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS) dan bahaya narkoba, alcohol, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA).
- 17) Pengendalian pemberian ijin trayek angkutan mempertimbangkan aspek kelayakan, daya dukung, kemampuan, sarana prasarana perhubungan, kemudahan akses antar moda transportasi.
- 18) Penyebarluasan dan penyuluhan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat serta pengembangan kemitraan media.
- 19) Mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban, kerjasama dengan seluruh aparat keamanan, organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan terorisme dan konflik sosial.

- 20) Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang usaha ekonomi masyarakat desa, peningkatan teknologi tepat guna (TTG) dalam bidang pertanian dalam arti luas.
- 21) Penanganan masalah sosial seperti pemberdayaan fakir miskin, anak terlantar, PSK, gelandangan dan pengemis, peningkatan penyediaan fasilitas dan pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, mental dan lanjut usia, serta menyelenggarakan pelatihan kerja bagi pengangguran dan fasilitasi penempatan pada berbagai bidang usaha sesuai dengan keahlian.
- 22) Perlindungan terhadap cagar budaya, perawatan dan pengamanan asset/benda kesenian, perlindungan, pemeliharaan dan pengamanan benda cagar budaya, pengembangan pemanfaatan kesenian tradisional, penyelenggaraan dan pengelolaan museum daerah, peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait lembaga adat, seni dan budaya daerah.
- 23) Mengintegrasikan pencapaian target kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, ketenagakerjaan, penanaman modal, kesenian dan ketahanan pangan.
- 24) Pencegahan dan pemberantasan korupsi, penanganan gangguan keamanan dalam negeri, pembangunan perbatasan antar Negara, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengembangan wilayah, pengembangan ekonomi daerah, penataan perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang, pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan.

- 2.4. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

Dengan kemajuan dan masalah yang dihadapi hingga tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014 maka beberapa tantangan pokok yang akan dihadapi dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Pertama, Sektor pertanian merupakan sektor yang diproyeksi mengalami sedikit peningkatan terutama di bidang perikanan dengan adanya program nasional pembangunan kawasan minapolitan di beberapa pulau di Kabupaten Bintan. Tetapi produksi perikanan maupun pertanian masih sangat terbatas akibat kondisi cuaca yang masih tidak menentu.

Kedua, mengefektifkan pengeluaran pemerintah pada tahun 2014 dan pemanfaatannya diarahkan pada kegiatan-kegiatan produktif yang mendorong berkembangnya peran serta masyarakat. Sementara itu, untuk menahan laju perlambatan ekonomi, dan mengarahkannya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan upaya penguatan ekspor dan pengendalian impor melalui langkah-langkah seperti diversifikasi pasar dan produk serta tujuan ekspor, percepatan perbaikan infrastruktur pendukung ekspor yang belum optimal juga harus terus dilakukan.

Ketiga, meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang relatif besar dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Adapun langkah-langkah atau kebijakan yang diambil untuk menghadapi masalah atau tantangan seperti diuraikan diatas, adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan efektivitas pengeluaran daerah melalui peningkatan perencanaan kebijakan APBD, penajaman prioritas anggaran, pengelolaan risiko fiskal peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran melalui pengembangan sistem informasi perbendaharaan, peningkatan pengelolaan kas

daerah, pengelolaan dan pengendalian anggaran, penyelenggaraan dan peningkatan sistem informasi keuangan.

2. Mempercepat fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat melalui optimalisasi penyaluran kredit perbankan, termasuk peningkatan akses permodalan kepada UMKM, terbentuknya kerangka pembiayaan mikro, peningkatan peran Bank Perkreditan Rakyat, peningkatan diversifikasi sumber-sumber pendanaan lembaga jasa keuangan non bank melalui pengaturan, pengembangan insentif dan law enforcement, penyempurnaan peraturan perundangan di bidang infrastruktur dan sektor-sektor penting lainnya.
3. Untuk meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi diperlukan debirokrasi dalam pelayanan perizinan investasi melalui penyederhanaan sistem dan prosedur, kepastian hukum serta pelaksanaan law enforcement yang konkrit.
4. Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga diberikan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi termasuk listrik.
5. Beberapa kebijakan sektoral yang perlu dilakukan Pemerintah Bintan supaya dapat mencapai target PDRB tahun 2015 adalah :
 - Sektor Pertanian terutama perikanan dan kelautan, dengan tantangan perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan penurunan hasil perikanan laut dari berbagai jenis komoditas perikanan di Kabupaten Bintan. Pengembangan minapolitan di Bintan Pesisir dan Mantang diharapkan sudah bisa menampakkan hasil yang positif pada tahun 2015. Penguatan sektor pertanian oleh kegiatan ekonomi produktif di sektor pertanian atau perdesaan termasuk didalamnya produk agroindustri untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus konservasi lingkungan.
 - Sektor Industri Pengolahan melalui penguatan industri pengolahan khususnya pada industri unggulan di Kabupaten Bintan perlu ditingkatkan kontribusinya terhadap PDRB melalui upaya perbaikan iklim usaha, pengembangan produk, perluasan pasar, aliansi strategi usaha dan pembenahan pada hambatan-hambatan untuk penguatan struktur industri.

- Sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor perdagangan memang merupakan salah satu mata pencaharian yang banyak ditekuni masyarakat di Kabupaten Bintan. Sektor ini didorong juga oleh sektor pariwisata yang potensinya belum digarap secara optimal seperti lokasi-lokasi wisata di Kabupaten Bintan yaitu Lagoi dan lokasi-lokasi wisata lainnya yang saat ini sudah secara rutin dikunjungi oleh wisatawan lokal. Pada tahun 2014 diharapkan adanya peningkatan sarana dan prasarana wisata yang ada untuk meningkatkan jumlah pengunjung, selain itu dukungan promosi dibutuhkan melalui even-even pariwisata agar kunjungan wisatawan semakin meningkat.
 - Sektor lain seperti sektor pertambangan dan galian, sektor listrik gas dan air bersih, sektor bangunan dan konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan sewa bangunan dan jasa perusahaan diupayakan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sektor-sektor yang berkontribusi utama dalam PDRB Kabupaten Bintan.
6. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pembangunan antara lain dengan mendorong pembangunan pertanian dan meningkatkan kegiatan ekonomi pedesaan. Kualitas pertumbuhan juga didukung dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan upah minimum agar tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan biaya-biaya non upah minimum mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses usaha kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan dilakukan melalui berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

2.5. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pada Tahun Anggaran 2015 arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Bintan sebagai berikut :

2.5.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2015 adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) merupakan sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya. Penggunaan SiLPA terutama digunakan untuk menutup defisit anggaran setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan. Atas defisit anggaran yang direncanakan juga dapat ditutupi dengan pinjaman daerah namun Pemerintah Kabupaten Bintan tidak mengambil kebijakan ini.

2.5.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2015 terutama untuk penyertaan modal pemerintah pada Bank BPR Bintang, sedangkan penyertaan modal untuk PT. Bank Riau Kepri sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintang Kepada PT. Bank Riau Kepri Untuk Tahun 2011 S/D 2014 telah dilaksanakan, sehingga penyertaan modalnya masih menjadi pertimbangan selanjutnya.